



**ADMINISTRASI PENDIDIKAN
DALAM PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DESA**

**Johan Bhimo Sukoco
Universitas Diponegoro**

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Dikirim : 11 Maret 2019
Revisi pertama : 26 Maret 2019
Diterima : 27 Maret 2019
Tersedia online : 27 Maret 2019

Kata Kunci: Administrasi Pendidikan,
Perpustakaan Desa, Pendidikan Non-
Formal

Email : johanbhimo@live.undip.ac.id

Perpustakaan desa merupakan perwujudan dari pendidikan non-formal. Hal ini berarti bahwa keberadaan perpustakaan desa diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat, utamanya dalam pemenuhan sumber-sumber informasi. Berdasarkan hal ini, maka penyelenggaraan perpustakaan desa perlu memperhatikan prinsip-prinsip administrasi pendidikan. Artikel ini merupakan pemikiran terkait pengelolaan perpustakaan desa dengan berbasis pada kajian administrasi pendidikan. Prinsip-prinsip administrasi pendidikan dapat diterapkan dalam penyelenggaraan perpustakaan desa, mengingat perpustakaan desa didirikan dalam pemenuhan pendidikan non-formal. Fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dapat diterapkan dalam pengelolaan perpustakaan desa untuk mencapai efektivitas dan efisiensi sesuai prinsip-prinsip dalam administrasi pendidikan. Hal ini penting untuk menjaga keberlangsungan program perpustakaan desa

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perpustakaan desa merupakan perwujudan dari pelaksanaan pendidikan non formal. Perpustakaan desa dapat menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat lokal. Sujono Hs (2006) menyebutkan bahwa perpustakaan desa dapat berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Hal ini berarti bahwa perpustakaan desa dapat menjalankan fungsinya sebagai pelaksana Pendidikan Luar Sekolah (PLS) atau *non formal education*.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Seperti yang tertuang dalam Pasal 26 ayat 1, pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Berdasarkan pasal ini, maka dapat diambil benang merah keterkaitan perpustakaan desa dengan pendidikan non formal. Perpustakaan desa merupakan sumber pendukung pendidikan sepanjang hayat bagi masyarakat lokal.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengelolaan perpustakaan desa perlu menerapkan prinsip-prinsip administrasi pendidikan. Satori (1980), menuliskan bahwa administrasi pendidikan merupakan keseluruhan proses kerjasama yang dilakukan dengan memanfaatkan segenap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Beranjak dari pernyataan ini, maka dapat ditarik hubungan antara perpustakaan desa dengan administrasi pendidikan. Penyelenggaraan perpustakaan desa perlu memperhatikan prinsip-prinsip efektif dan efisien dalam menggerakkan segala sumber daya yang ada terkait penyediaan informasi bagi masyarakat lokal.

ISI PEMIKIRAN DAN PEMBAHASAN

Perpustakaan Desa : Sumber Pendidikan Non Formal

Maskun (1994), menyebutkan bahwa perpustakaan desa merupakan jenis perpustakaan rakyat yang memiliki fungsi sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan serta kemampuan membaca masyarakat guna mencerdaskan kehidupan masyarakat desa. Hal ini merupakan bagian integral dari pembangunan desa. Lebih lanjut, Sujono Hs (2006), menyebutkan bahwa perpustakaan desa memiliki beberapa fungsi, yaitu : mengumpulkan bahan pustaka, mengolah serta menyebarluaskan bahan pustaka, dan melestarikan bahan pustaka bagi masyarakat.

Beranjak dari hal ini, maka perpustakaan desa diharapkan dapat menjadi tonggak pendidikan non-formal bagi masyarakat. Penyelenggaraan perpustakaan desa diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat lokal, sehingga sejalan dengan tujuan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahan pustaka yang tersedia di perpustakaan desa idealnya bertemakan pengetahuan terapan atau praktis, seperti beternak, bertani, berkebun, dan lain sebagainya. Hal ini dirasa penting diperhatikan, mengingat kebutuhan masyarakat lokal terkait pengetahuan terapan lebih dibutuhkan dibandingkan keilmuan lainnya.

Perpustakaan desa merupakan perwujudan pendidikan non-formal. Hasbullah (2005), menyebutkan bahwa pendidikan luar sekolah atau seringkali disebut *out of*

school education merupakan pendidikan yang dilakukan di luar system sekolah pada umumnya. Penekanan pengertiannya lebih diarahkan pada segala pendidikan yang berlangsung di luar sekolah. Lebih lanjut, Ahmadi dan Uhbiyati (1991), menuliskan bahwa pendidikan non-formal merupakan pendidikan yang dilaksanakan dengan kaidah-kaidah tertentu, namun demikian tidak terlalu mengikuti peraturan yang ketat. Berdasarkan beberapa pengertian ini, maka pendidikan non-formal ini dapat diselenggarakan melalui perpustakaan desa.

Badan Arsip dan Perpustakaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (2010) menguraikan fungsi perpustakaan desa/kelurahan ini sebagai berikut : (1) mengumpulkan, mengorganisasikan dan mendayagunakan berbagai bahan perpustakaan tercetak maupun terekam; (2) mensosialisasikan serta memanfaatkan jasa perpustakaan; (3) mendekatkan referensi buku dan bahan perpustakaan lainnya kepada masyarakat setempat (4) sebagai sarana untuk pengembangan minat, memupuk bakat, kegemaran/*hobby*, kemampuan/*skill*, serta kebiasaan membaca menuju masyarakat madani; dan (5) tempat rekreasi dengan menyediakan bacaan hiburan sehat.

Beberapa perundang-undangan telah memayungi penyelenggaraan perpustakaan desa. Semisal, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa dan Kelurahan. Adapun perundang-undangan ini ialah turunan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan. Pasal 1 dalam Keputusan Menteri ini menyebutkan bahwa perpustakaan desa/kelurahan merupakan sebuah wadah penyediaan bahan bacaan sebagai salah satu sumber belajar bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, serta menunjang pelaksanaan pendidikan nasional.

Perundang-undangan lainnya, yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 1984 tentang penyelenggaraan perpustakaan desa/kelurahan. Pada Instruksi Menteri ini disebutkan bahwa penyelenggaraan perpustakaan pada hakikatnya bertujuan untuk menunjang pelaksanaan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya alenia keempat dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31. Lebih lanjut, dituliskan bahwa perlu didirikannya perpustakaan desa ini, disamping bertujuan dalam membantu mencerdaskan pendidikan, juga merupakan salah satu media penunjang berhasilnya pembangunan.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan. Undang-Undang ini sudah mengatur secara komperhensif mengenai perpustakaan, termasuk di dalamnya perpustakaan desa. Pada Pasal 3 telah menyebutkan bahwa perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

Untuk lebih jelasnya memahami peraturan perundang-undangan terkait perpustakaan desa, berikut ini dapat dilihat dalam Tabel 1 :

Tabel 1. Peraturan Perundang-Undangn Perpustakaan Desa

| No. | Perundang-undangan |
|-----|---|
| 1. | Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa dan Kelurahan. |
| 2. | Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan. |

Lanjutan Tabel 1. Peraturan Perundang-Undangan Perpustakaan Desa

| No. | Perundang-undangan |
|-----|---|
| 3. | Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 1984 tentang penyelenggaraan perpustakaan desa/kelurahan. |
| 4. | Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan. |

Sumber : Data Sekunder (2019)

Penelitian terkait perpustakaan desa telah banyak dilakukan peneliti lain (Septiana, 2007; Firmansyah, 2009; Dent, 2006; dan Sukoco dan Winarni, 2018). Septiana (2007), melalui penelitiannya terkait *Community-Based Library* di Rumah Cahaya, Melati Taman Baca, dan Kedai Baca Sanggar Barundak, menyebutkan bahwa penyelenggaraan perpustakaan dapat meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpustakaan diselenggarakan berbasis kearifan lokal. Hal ini disesuaikan visi dan misi masyarakat setempat.

Firmansyah (2009), melalui risetnya terkait perpustakaan desa di Gunung Batu, Bogor, menyebutkan bahwa pembangunan perpustakaan di daerah tersebut dilakukan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa partisipasi interaktif ditunjukkan masyarakat setempat. Riset ini menemukan fakta bahwa masyarakat setempat membutuhkan pengetahuan terkait pertanian dan peternakan dalam mendukung kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal.

Lebih lanjut, Dent (2006), melalui penelitiannya terkait perpustakaan Kitengesia di Uganda, menyebutkan bahwa perpustakaan desa merupakan model yang sukses dalam melayani kebutuhan masyarakat dalam pelayanan pendidikan, utamanya melek huruf. Di sisi lain, Sukoco dan Winarni (2018) melalui risetnya mengkaji perpustakaan di Desa Puro, Kabupaten Sragen, menyebutkan bahwa perpustakaan desa hadir bukan hanya sebatas tempat mengumpulkan, mengolah, dan melestarikan bahan pustaka. Lebih dari itu, perpustakaan desa merupakan tempat penyedia informasi. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa masyarakat lokal membutuhkan informasi ilmu-ilmu terapan seperti pertanian, peternakan, dan keterampilan.

Beranjak dari beberapa penelitian ini, maka dapat dilihat bahwa peneliti-peneliti sepakat menempatkan perpustakaan desa dalam ranah pendidikan non-formal sebagai sumber pengetahuan (Septiana, 2007; Firmansyah, 2009; Dent, 2006; dan Sukoco dan Winarni, 2018). Adapun pengetahuan yang idealnya disediakan di perpustakaan desa ialah bahan-bahan pustaka terkait ilmu-ilmu terapan. Hal ini dikarenakan ilmu-ilmu terapan lebih dibutuhkan masyarakat lokal dalam meningkatkan kapasitas mereka.

Untuk memahami berbagai kajian terkait perpustakaan desa ini, berikut ini dapat dilihat dalam Tabel 1 :

Tabel 2. Penelitian Terdahulu Bertopik Perpustakaan Desa

| Peneliti | Tahun | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
|-------------------------|-------|---|---|
| Ratri Indah Septiana | 2007 | Perkembangan Perpustakaan Berbasis Komunitas: Studi Kasus Pada Rumah Cahaya, Melati Taman Baca dan Kedai Sanggar Barundak | Penyelenggaraan perpustakaan dapat meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat lokal. |

Lanjutan Tabel 2. Penelitian Terdahulu Bertopik Perpustakaan Desa

| Peneliti | Tahun | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
|---------------------------------------|-------|--|--|
| Firmansyah | 2009 | Pembangunan Perpustakaan Masyarakat dengan Partisipasi Masyarakat (Kaji Tindak Partisipatif/ <i>Participatory Action Research</i> di Gunung Batu, Desa Tangkil, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat) | Masyarakat lokal membutuhkan pengetahuan terkait pertanian dan peternakan dalam mendukung kualitas SDM lokal. |
| Valeda Frances Dent | 2006 | <i>Modelling the rural community library – characteristics of the Kitengesa Library in rural Uganda</i> | Perpustakaan desa sukses melayani kebutuhan pendidikan masyarakat utamanya melek huruf. |
| Johan Bhimo Sukoco dan Liliek Winarni | 2018 | Administrasi Pengelolaan Perpustakaan di Desa Puro Kabupaten Sragen. | Perpustakaan desa hadir bukan hanya tempat melestarikan bahan pustaka, melainkan tempat penyedia informasi ilmu terapan. |

Sumber : Data Sekunder (2018)

Prinsip-Prinsip Administrasi Pendidikan dalam Perpustakaan Desa

Perpustakaan desa sebagai penyelenggara pendidikan non-formal perlu memperhatikan kaidah-kaidah dalam administrasi pendidikan. Sutisna (1989) menyebutkan bahwa administrasi pendidikan hadir sebagai perwujudan 3 (tiga) bidang perhatian dan kepentingan, meliputi : (1) setting administrasi pendidikan (demografi, geografi, kebudayaan, ideology, dan pembangunan), (2) pendidikan (bidang administrasi), dan (3) substansi administrasi pendidikan (prosesnya, tugas, azas-azas, serta perilaku administrasi). Lebih lanjut, Mahidin (2017), menyebutkan bahwa ukuran keberhasilan administrasi pendidikan ialah produktivitas pendidikan, yaitu dilihat dari produk hasil pendidikan, serta efektivitas dari proses, dan efisiensi.

Beranjak dari hal tersebut, maka perpustakaan desa perlu memperhatikan tujuan penyelenggaraannya untuk tercapainya efisiensi dan efektivitas. Ironisnya, berdasarkan data Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, disebutkan bahwa dari sekitar 70.000 desa dan 9000 kecamatan di Indonesia, tidak lebih dari setengah persennya saja yang telah memiliki perpustakaan sesuai standar. Lebih lanjut, dari sekitar 316 Daerah Tingkat II, baru 70 % yang memiliki perpustakaan standar (Djunaidi, 2007). Hal ini tentu memperhatikan, mengingat penyelenggaraan perpustakaan desa idealnya menerapkan prinsip-prinsip administrasi pendidikan, serta

mengingat perpustakaan desa merupakan perwujudan dari pendidikan non-formal. Prinsip-prinsip efektif dan efisien dalam administrasi pendidikan dirasa penting untuk diperhatikan dalam penyelenggaraan perpustakaan desa.

Pidarta (1988), menuliskan bahwa di dalam pendidikan, manajemen diartikan sebagai segenap aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan, dengan tujuan agar dapat terpusat dalam usaha untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya. Beranjak dari pernyataan ini, maka dapat ditarik benang merah, sumber pendidikan non-formal dapat diperoleh melalui penyelenggaraan perpustakaan desa secara memadai. Hal ini perlu disesuaikan dengan tujuan pendidikan non-formal, dimana mencerdaskan masyarakat sekitar perpustakaan desa tersebut.

Administrasi pendidikan atau seringkali disebut pula dengan manajemen pendidikan, merupakan penggambaran perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam sektor pendidikan. Atmodiwirio (Engkoswara dan Komariah, 2011), menuliskan bahwa manajemen pendidikan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, serta mengendalikan tenaga pendidikan, serta segenap sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berkaitan dengan penyelenggaraan perpustakaan desa, maka perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan perpustakaan desa perlu dirumuskan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan perpustakaan desa.

Pertama, perencanaan atau *planning*, berarti bahwa dalam penyelenggaraan perpustakaan desa perlu memperhatikan tujuan didirikannya. Sutarno NS (2006), menyebutkan bahwa penyelenggaraan perpustakaan pada hakikatnya ditujukan dalam rangka mendukung dan memfasilitasi proses pendidikan, baik secara formal maupun non-formal. Hal ini seperti yang telah dicanangkan oleh UNESCO terkait Pendidikan Untuk Semua (*Education for All*), dimana kemudian berkembang menjadi program Perpustakaan Untuk Semua (*Library for All*).

Kedua, pengorganisasian atau *organizing*, berarti bahwa penyelenggaraan perpustakaan desa perlu dibentuk struktur organisasi yang jelas. Semisal, penanggung jawab, pustakawan, operator, dan lain sebagainya. Hal ini penting, mengingat perpustakaan desa biasanya mempekerjakan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat setempat, sehingga pengorganisasian ini dirasa perlu dilakukan untuk mencegah adanya ketimpangan tugas maupun ketidakteraturan arus komunikasi.

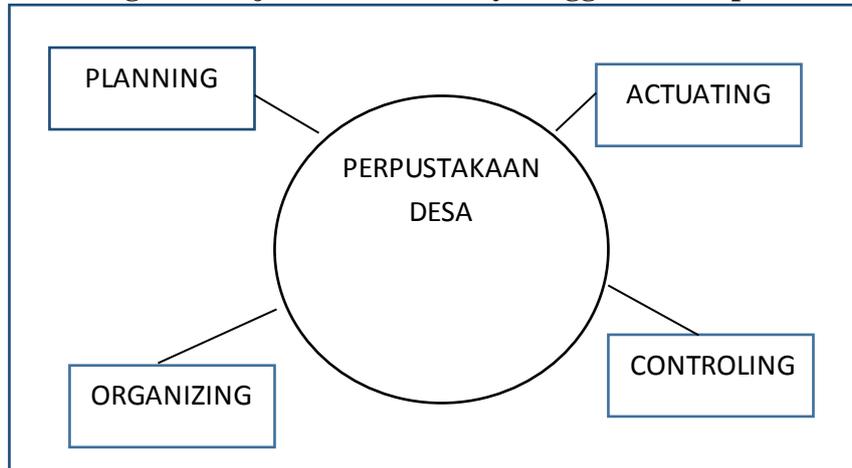
Ketiga, penggerakan atau *actuating*, berarti bahwa penyelenggaraan perpustakaan desa perlu digerakkan sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penggerakan ini seringkali menjadi problem krusial, mengingat sebagian besar pengelolaan perpustakaan desa dilakukan oleh SDM lokal dengan prinsip gotong royong (dan sukarela). Diperlukan strategi penggerakan melalui penyadaran bahwa keberadaan perpustakaan desa sangat penting bagi masyarakat setempat, sehingga diharapkan akan menumbuhkan motivasi kerja bagi segenap SDM didalamnya.

Keempat, pengawasan atau *controlling*. Hal ini berarti bahwa penyelenggaraan perpustakaan desa perlu dilakukan pengawasan keberlangsungannya. Seringkali, jamak terjadi pendirian perpustakaan desa kurang diperhatikan keberlangsungannya (*sustainable development*). Pihak yang idealnya melakukan pengawasan ialah penanggung jawab program, semisal Kepala Desa. Hal ini mengingat perpustakaan

desa ini didirikan atas inisiatif warga desa berdasarkan instruksi dari atasan (Sulistyo-Basuki, 1994).

Untuk lebih memahami penerapan prinsip administrasi pendidikan yang tertuang dalam fungsi-fungsi manajemen, berikut ini dapat diperhatikan dalam Gambar 1 :

Gambar 1. Fungsi Manajemen dalam Penyelenggaraan Perpustakaan Desa



KESIMPULAN DAN SARAN

Perpustakaan desa merupakan perwujudan penyelenggaraan pendidikan non-formal. Perpustakaan desa didirikan dengan tujuan bukan hanya menyediakan sumber bahan-bahan pustaka, melainkan sebagai penyedia sumber informasi bagi masyarakat lokal. Oleh karena itu, penyelenggaraan perpustakaan desa perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal. Kebutuhan masyarakat lokal seperti bahan pustaka terkait ilmu-ilmu terapan (bertani, beternak, bercocok tanam, keterampilan, dan lain sebagainya), perlu menjadi fokus perhatian penyelenggara perpustakaan desa.

Penyelenggaraan perpustakaan desa perlu menerapkan prinsip-prinsip administrasi pendidikan, yang tertuang dalam fungsi manajemen, seperti: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Hal ini penting, mengingat penyelenggaraan perpustakaan desa merupakan perwujudan dari pendidikan non-formal. Kedepannya, perlu diperhatikan keberlangsungan program (*sustainable development*) dari perpustakaan desa, disesuaikan dengan prinsip-prinsip administrasi pendidikan ini agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan non-formal berbasis perpustakaan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu dan Nur Uhbiyati. 1991. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Arsip dan Perpustakaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2010. *Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan*.
- Dent, Valeda Frances. 2006. Modelling the rural community library – characteristics of the Kitengesa Library in rural Uganda. *Journal New Library World*. Vol.107 No. 1220/1221, 2006, pp.16-30.

- Djunaidi. 2007. Pengembangan Kebiasaan Membaca Masyarakat Melalui Perpustakaan. *Jurnal Kepustakawanan dan Masyarakat Membaca*. Vol. 23, No.1, Januari-Juni 2007. 1-9.
- Engkoswara, H. dan Aan Komariah. 2011. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Firmansyah. 2009. “Pembangunan Perpustakaan Masyarakat dengan Partisipasi Masyarakat (Kaji Tindak Partisipatif/Participatory Action Research di Gunung Batu, Desa Tangkil, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat)”. *Skripsi S1 Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Jakarta*. Tidak diterbitkan.
- Hasbunillah. 2005. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mahidin. 2017. Kajian Administrasi Pendidikan di Dunia Pendidikan. *Jurnal Al-Irsyad*. Volume VIII, Nomor 1, Januari – Juni 2017.
- Maskun, Sumitro. 1994. *Pembangunan Masyarakat Desa – Asas, Kebijakan, dan Manajemen*. Yogyakarta: Media Widya Mandala.
- Pidarta, Made. 2008. *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara. Universitas Negeri Semarang.
- Satori, Djam’an. 1980. *Administrasi Pendidikan*. Bandung. IKIP Bandung.
- Septiana, Ratri Indah. 2007. “Perkembangan Perpustakaan Berbasis Komunitas: Studi Kasus Pada Rumah Cahaya, Melati Taman Baca dan Kedai Sanggar Barudak”. *Skripsi S1 Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Jakarta*. Tidak diterbitkan.
- Sujono Hs. 2006. Home Schooling dan Peran Perpustakaan. dalam Kosam Rimbarawa dan Supriyanto (ed.). *Aksentuasi Perpustakaan dan Pustakawan*. Jakarta: Ikatan Pustakawan Indoensia Pengurus Daerah DKI Jakarta bekerja sama dengan Sagung Seto. hal 305-316.
- Sukoco, Johan Bhimo dan Liliek Winarni. 2018. Administrasi Pengelolaan Perpustakaan di Desa Puro Kabupaten Sragen. *Journal of Public Administration and Local Governance*. Volume 2 Nomor 2, 10 Desember 2018.
- Sutisna, Oteng. 1989. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Angkasa.